



Katalog BPS :2302003.82

Survei Angkatan Kerja Nasional

INDIKATOR KETENAGAKERJAAN PROVINSI MALUKU UTARA SEMESTER II TAHUN 2013



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROV. MALUKU UTARA**



Katalog BPS :2302003.82

Survei Angkatan Kerja Nasional

INDIKATOR KETENAGAKERJAAN PROVINSI MALUKU UTARA SEMESTER II TAHUN 2013

<http://malut.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROV. MALUKU UTARA**

INDIKATOR KETENAGAKERJAAN PROVINSI MALUKU UTARA SEMESTER II TAHUN 2013

ISBN : -
No. Publikasi : 82520.1401
Katalog BPS : 2302003.82
Ukuran Buku : B5 (17,5 x 25)
Jumlah Halaman : 27 Halaman

Naskah :
Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit :
Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan oleh :
Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Dicetak oleh :

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Tenaga kerja dan lapangan pekerjaan masih menjadi bahasan yang menarik di Indonesia. Terlebih jika dikaitkan dengan bonus demografi yang seharusnya punya potensi dan peran besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Maka dari itu data ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan indikator pasar ketenagakerjaan. Sumber utama data ketenagakerjaan adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 1976. Survei ini khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/data ketenagakerjaan. Pada beberapa survei sebelumnya, pengumpulan data ketenagakerjaan dipadukan dalam kegiatan lainnya, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Sensus Penduduk (SP), dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Publikasi Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara Semester II Tahun 2013 merupakan publikasi yang berisi berbagai data dan informasi seputar ketenagakerjaan Maluku Utara pada bulan Agustus 2013. Publikasi ini menyajikan analisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan ketenagakerjaan serta potensi ketenagakerjaan yang ada di Maluku Utara.

Diharapkan dengan terbitnya publikasi ini, kebutuhan data ketenagakerjaan lebih mudah dipahami oleh pengguna data baik oleh instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi maupun masyarakat luas. Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam mengusahakan terwujudnya publikasi ini, baik langsung maupun tidak langsung, diucapkan terima kasih.

Ternate, April 2014
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Maluku Utara



M. Habibullah, S.Si., M.Si.

DAFTAR ISI

UMUM	1
TUJUAN	2
CAKUPAN	2
PENJELASAN TEKNIS	2
PARTISIPASI DUNIA KERJA	3
INDIKATOR TENAGA KERJA	8
INDIKATOR PENGANGGURAN	14
TABEL-TABEL LAMPIRAN	19

<http://malut.bps.go.id>

INDIKATOR KETENAGAKERJAAN PROVINSI MALUKU UTARA SEMESTER II TAHUN 2013

UMUM

Data ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan indikator pasar ketenagakerjaan di Maluku Utara. Sumber utama data ketenagakerjaan adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Survei ini khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/data ketenagakerjaan. Pada beberapa survei sebelumnya, pengumpulan data ketenagakerjaan dipadukan dalam kegiatan lainnya, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Sensus Penduduk (SP), dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Sakernas pertama kali diselenggarakan pada tahun 1976, kemudian dilanjutkan pada tahun 1977 dan 1978. Pada tahun 1986–1993, Sakernas diselenggarakan secara triwulanan di seluruh provinsi di Indonesia, baru sejak tahun 1994–2001, Sakernas dilaksanakan secara tahunan yaitu setiap bulan Agustus. Pada tahun 2002–2004, di samping Sakernas Tahunan dilakukan pula Sakernas Triwulanan. Pada tahun 2005–2010, pengumpulan data Sakernas dilaksanakan secara semesteran pada bulan Februari (Semester I) dan Agustus (Semester II).

Jumlah sampel untuk Sakernas Agustus 2013 sebanyak 2.560 rumah tangga

Mulai tahun 2011 Sakernas dilakukan kembali secara triwulanan, yaitu bulan Februari (Triwulan I), Mei (Triwulan II), Agustus (Triwulan III), dan November (Triwulan IV). Sakernas Triwulanan ini dimaksudkan untuk memantau indikator ketenagakerjaan secara dini di Indonesia, yang mengacu pada KILM (*The Key Indicators of the Labour Market*) yang direkomendasikan oleh ILO (*The International Labour Organization*). Hasil Sakernas Triwulan I, II, dan IV disajikan sampai tingkat provinsi (jumlah sampel 50.000 rumah tangga). Sementara Sakernas Triwulan III, disajikan sampai tingkat kabupaten/kota, karena jumlah sampel cukup besar sekitar 200.000 rumah tangga, dimana jumlah tersebut terdiri dari 50.000 rumah tangga merupakan sampel Sakernas Triwulanan dan 150.000 rumah tangga sampel Sakernas tambahan.

Provinsi Maluku Utara Sampel terpilih untuk Sakernas Agustus 2013 berjumlah sekitar 2.560 rumah tangga dengan tingkat pemasukan dokumen 88,32 persen. Dengan jumlah sampel tersebut hasil Sakernas tabel-tabel yang disajikan dirinci menurut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) dan daerah (perkotaan dan perdesaan), dengan penomoran tabel yang dimulai dengan tabel total.

TUJUAN

Tujuan penyusunan buku ini adalah menyajikan data hasil Sakernas Agustus 2013 dalam bentuk ulasan dan grafik serta tabel yang lebih ringkas untuk memudahkan pengguna data dalam memahami data-data pokok yang dihasilkan. Tabel yang lebih rinci juga disajikan pada lampiran.

CAKUPAN

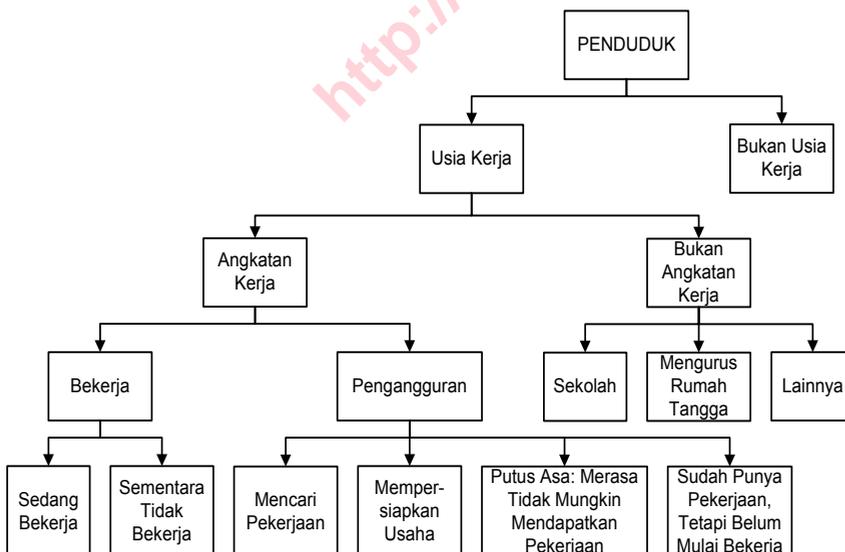
Pembahasan hasil Sakernas Agustus 2013 dalam publikasi ini dibagi menjadi beberapa pokok bahasan yaitu partisipasi di dunia kerja, indikator tenaga kerja dan indikator pengangguran. Pembahasan juga dilengkapi dengan data tahun sebelumnya sebagai pembandingan untuk melihat perkembangannya. Sedangkan untuk melihat keterbandingan antar daerah, beberapa data dan ulasan disajikan menurut kabupaten/ kota.

PENJELASAN TEKNIS

Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik adalah *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh *International Labor Organization* (ILO). Hal ini bertujuan untuk menjamin keterbandingan antar Negara. Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.

Publikasi ini menyajikan data dan ulasan partisipasi di dunia kerja, indikator tenaga kerja dan indikator pengangguran di Maluku Utara

DIAGRAM KENENAGAKERJAAN



Indonesia menggunakan batas bawah usia kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari usia 10 tahun) dan tanpa batas atas usia kerja. Di negara lain penentuan batas bawah dan batas atas usia kerja bervariasi sesuai kebutuhan/situasinya.

Periode referensi yang diterapkan dalam Sakernas adalah satu minggu. Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (*a short recent reference period*) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall*) dan juga mengurangi masalah (statistik) yang timbul oleh karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan dan karakteristik penduduk lainnya.

PARTISIPASI DUNIA KERJA

Jumlah angkatan kerja menggambarkan jumlah penduduk usia kerja yang aktif dalam perekonomian yaitu mereka yang sedang bekerja, sementara tidak bekerja dan mereka yang menganggur.

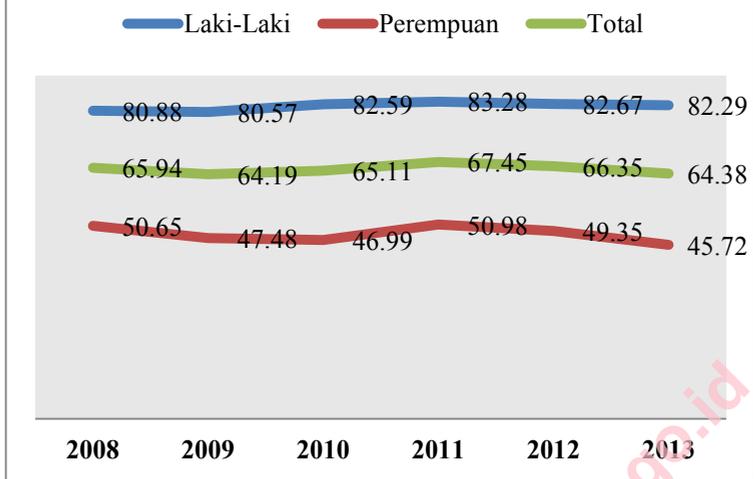
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja, mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Ukuran ini merupakan indikasi relatif dari pasokan tenaga kerja tersedia yang terlibat dalam produksi barang dan jasa. Data angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi.

Tingkat dan pola partisipasi angkatan kerja cenderung bergantung pada ketersediaan kesempatan kerja dan perbedaan tuntutan memperoleh pendapatan antar kelompok penduduk. Oleh sebab itu, partisipasi penduduk dalam angkatan kerja cenderung berbeda jika dilihat antara beberapa variabel demografi.

TPAK dihitung dari persentase perbandingan jumlah angkatan kerja dengan seluruh penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Konsep Angkatan Kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja (termasuk didalamnya adalah yang mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja) dan penganggur. Penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

*TPAK
dihitung dari
persentase
perbandingan
jumlah angkatan
kerja dengan
seluruh
penduduk usia
kerja (penduduk
usia 15 tahun ke
atas)*

Gambar 1. TPAK Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2008-2013



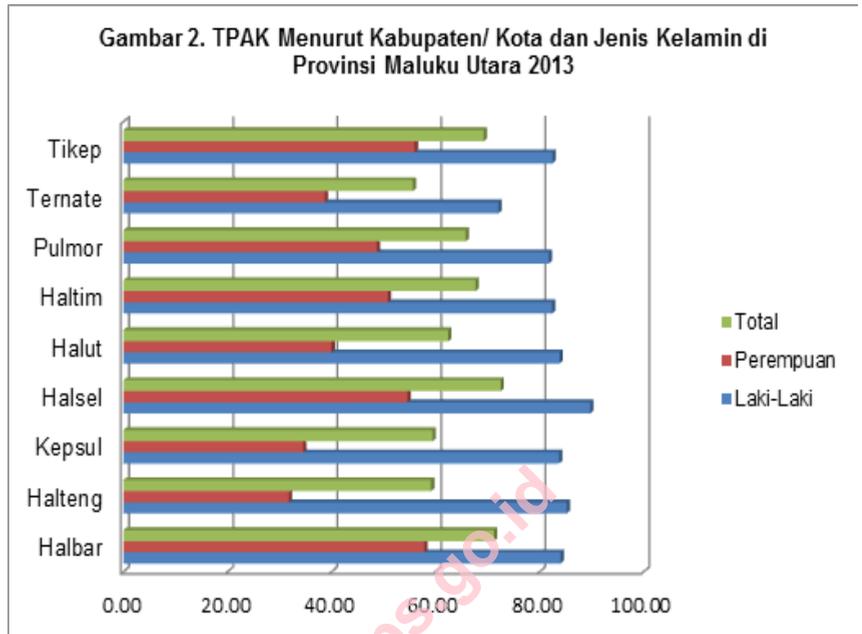
Pasokan tenaga kerja di Maluku Utara cukup memadai yaitu selalu diatas 60 persen dari penduduk usia kerja yang dimiliki. Pada Agustus 2013, TPAK Maluku Utara mencapai 64,38 persen, sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya (66,35 %). Angka tersebut berarti dari 100 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Maluku Utara yang ikut berpartisipasi aktif dalam perekonomian sekitar 64 orang. Sedangkan 36 orang lainnya melakukan kegiatan lain seperti: bersekolah, mengurus rumah tangga, pensiun, atau melakukan kegiatan lainnya yang tidak bernilai ekonomis.

Pada Agustus 2013, TPAK Maluku Utara mencapai 64,38 persen

TPAK laki-laki sebesar 82,29 persen yang sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya (82,67 %). Sedangkan TPAK perempuan juga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya (49,35 %) yaitu sebesar 45,72 persen.

Partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja Maluku Utara selama lima tahun terakhir selalu jauh lebih rendah dibanding laki-laki. Hal ini tercermin dari nilai TPAK yang dihasilkan dimana TPAK laki-laki hampir dua kali lipat perempuan. TPAK laki-laki selalu diatas 80 persen, sedangkan TPAK perempuan berada di kisaran 50 persen. Hal ini bisa mengindikasikan bahwa perempuan lebih banyak mengurus rumah tangga.

T P A K tertinggi menurut Kabupaten/ Kota di Maluku Utara adalah H a l m a h e r a Selatan (72,52 %)



Di Maluku Utara, tingkat partisipasi penduduk untuk aktif secara ekonomi bervariasi antar kabupaten/ kota. Perbedaan pola pikir, tradisi, kebijakan pemerintah daerah dapat mempengaruhi pola TPAK pada tiap-tiap Kabupaten/ Kota.

Dari Gambar 2 dapat dilihat bahwa kabupaten/ kota dengan TPAK tertinggi adalah Halmahera Selatan (72,52 %) diikuti Halmahera Barat (71,23 %), dan Tidore Kepulauan (69,26 %). Sementara itu tiga kabupaten/ kota dengan TPAK terendah adalah Ternate (55,66 %), Halmahera Tengah (59,17 %) dan Kepulauan Sula (59,45 %).

Sedangkan untuk perempuan dapat dilihat bahwa kabupaten/ kota dengan TPAK perempuan tertinggi adalah Halmahera Barat (57,84 %) diikuti Tidore Kepulauan (56,02 %), dan Halmahera Selatan (54,65 %). Sementara itu tiga kabupaten/ kota dengan TPAK perempuan terendah adalah Halmahera Tengah (31,79 %), Kepulauan Sula (34,57 %) dan Ternate (38,74 %).

Tabel 1. Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Maluku Utara, 2013

Pendidikan yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Penduduk Usia Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Total	
<= SD dan SMP	61.95	34.44	60.89	65.34
SMA Umum	21.55	35.11	22.07	22.04
SMA Kejuruan	4.95	8.40	5.08	4.30
Diploma I/II/III	3.57	2.53	3.53	2.57
Universitas	7.98	19.52	8.43	5.75
Total	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Kualitas tenaga kerja suatu wilayah dapat diukur salah satunya dengan melihat tingkat pendidikannya. Angkatan kerja di Maluku Utara didominasi oleh mereka yang berpendidikan SMP ke bawah , yaitu mencapai 60,89 persen dari total angkatan kerja, Sementara angkatan kerja yang berpendidikan di atas SMA hanya 11,96 persen dari total angkatankerja. Hal ini mencerminkan kualitas tenaga kerja di Maluku Utara masih rendah (Tabel 1).

60,89 persen angkatan kerja di Maluku Utara berpendidikan rendah

<http://maluku.bps.go.id>

Tabel 2. TPAK Menurut Pendidikan, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Maluku Utara 2013

Pendidikan yang Ditamatkan	Jenis Kelamin		Daerah Tempat Tinggal	
	Laki-Laki	Perempuan	Kota	Desa
<= SD dan SMP	79.98	41.47	47.74	62.94
SMA Umum	83.09	39.23	53.51	72.75
SMA Kejuruan	85.85	57.77	68.47	87.30
Diploma I/II/III	91.73	86.45	86.87	89.02
Universitas	96.09	92.12	92.35	96.92

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

TPAK penduduk usia kerja dengan tingkat pendidikan S2/S3 paling tinggi dibandingkan semua jenjang pendidikan yaitu diatas 90 persen. Dengan kata lain hampir semua penduduk usia kerja yang berpendidikan S2/S3 berpartisipasi aktif dalam pasar kerja.

TPAK laki-laki jauh lebih tinggi dari pada TPAK perempuan utamanya pada jenjang pendidikan menengah ke bawah.

Jika dibandingkan antara mereka yang lulus pendidikan menengah kejuruan dengan pendidikan menengah umum, ternyata tingkat partisipasi untuk aktif secara ekonomi lebih tinggi pada perempuan yang berpendidikan SMA Kejuruan. Untuk laki-laki tidak jauh berbeda.

Berbeda bila kita lihat berdasarkan tempat tinggalnya. Baik lulusan SMA Umum maupun SMA Kejuruan tingkat partisipasi untuk aktif secara ekonomi di pedesaan selalu lebih tinggi dibanding perkotaan. Dimana porsi SMA Kejuruan lebih tinggi dibanding SMA Umum.

TPAK pada setiap jenjang pendidikan tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok antara daerah pedesaan maupun perkotaan, namun sebaliknya jika dibedakan menurut jenis kelamin. TPAK laki-laki jauh lebih tinggi dari pada TPAK perempuan utamanya pada jenjang pendidikan menengah ke bawah.

INDIKATOR TENAGA KERJA

a. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Kategorisasi menurut status pekerjaan dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu daerah. Dengan kemajuan pembangunan, suatu daerah biasanya akan mengharapkan untuk melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah pekerja yang digaji (buruh/karyawan/pegawai), dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian.

Kategori status Pekerjaan Utama pada publikasi ini dibedakan menjadi 7 (tujuh) yaitu :

1. Berusaha sendiri
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tdk dibayar
3. Berusaha dibantu buruh tetap/brh dibayar
4. Buruh/karyawan
5. Pekerja bebas pertanian
6. Pekerja bebas non pertanian
7. Pekerja Tak Dibayar

Tabel 3. Persentase Penduduk yang bekerja menurut status dalam pekerjaan utama, jenis kelamin dan daerah tempat tinggal, Agustus 2013

Status Pekerjaan Utama	Daerah		Jenis Kelamin		Total
	K	D	L	P	
1. Berusaha sendiri	21.90	24.33	28.62	14.15	23.71
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar	8.00	20.39	21.12	9.67	17.24
3. Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	4.04	2.44	3.99	0.62	2.85
4. Buruh/karyawan/pegawai	49.53	19.21	27.35	26.08	26.92
5. Pekerja bebas di pertanian	1.53	4.14	4.65	1.17	3.47
6. Pekerja bebas di non pertanian	2.34	1.58	2.56	0.25	1.78
7. Pekerja keluarga/tak dibayar	12.66	27.92	11.71	48.05	24.04
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Penduduk Maluku Utara yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai memiliki persentase tertinggi mencapai 26,92 persen, diikuti pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 24,04 persen, dan berusaha sendiri sebesar 23,71 persen. Sementara pekerja yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap/dibayar dan pekerja bebas pertanian maupun non pertanian sangat kecil, bahkan kurang dari lima persen.

26,92 persen penduduk yang bekerja di Maluku Utara berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai

Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggalnya, pekerja di perkotaan hampir separuhnya berstatus buruh/karyawan/pegawai yaitu mencapai 49,53 persen. Diikuti terbesar kedua berusaha sendiri sebesar 21,90 persen dan pekerja keluarga/ tak dibayar sebesar 12,66 persen. Sedangkan pekerja di pedesaan paling banyak berstatus pekerja keluarga/tak dibayar sebesar 27,92 persen, diikuti berusaha sendiri sebesar 24,33 persen.

Sementara berdasarkan jenis kelamin, pekerja laki-laki paling banyak berusaha sendiri sebesar 28,62 persen, diikuti buruh/karyawan/pegawai sebesar 27,35 persen. Sedangkan pekerja perempuan hampir separuhnya adalah pekerja keluarga/tak dibayar mencapai 48,05 persen.

Tabel 4. Persentase Penduduk yang bekerja menurut status dalam pekerjaan utama menurut Kabupaten/ Kota, Agustus 2013

Kabupaten/ Kota	Status Pekerjaan Utama (%)							Total
	1	2	3	4	5	6	7	
Halmahera Barat	14.84	27.46	1.27	12.35	6.41	1.92	35.74	100.00
Halmahera Tengah	16.89	21.40	1.96	39.02	2.12	3.59	15.02	100.00
Kepulauan Sula	28.32	15.21	4.04	23.04	4.90	1.29	23.19	100.00
Halmahera Selatan	18.93	20.13	4.15	19.92	2.02	0.90	33.95	100.00
Halmahera Utara	36.37	12.68	0.86	24.66	3.68	1.93	19.81	100.00
Halmahera Timur	17.79	25.97	2.51	24.71	1.77	3.44	23.80	100.00
Pulau Morotai	42.39	20.19	0.25	19.83	6.78	0.39	10.17	100.00
Ternate	26.51	6.73	2.96	49.08	1.73	2.23	10.77	100.00
Tidore Kepulauan	10.85	18.32	5.43	27.23	4.48	1.69	32.00	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Dari sembilan kabupaten/ kota yang ada di Maluku Utara, memiliki pekerja dengan status pekerjaan utama yang bervariasi. Di Halmahera Barat posisi tertinggi adalah pekerja tak dibayar yaitu 35,74 persen. Di Halmahera Tengah, buruh/karyawan mencapai 39,02 Persen. Kepulauan Sula, berusaha sendiri mencapai 28,32 persen. Di Halmahera Selatan, buruh/pekerja tak dibayar mencapai 33,95 persen. Di Halmahera Utara, berusaha sendiri mencapai 36,37 persen. Di Halmahera Timur, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tdk dibayar mencapai 25,97 persen. Di Pulau Morotai, berusaha sendiri mencapai 42,39 persen. Di Ternate, buruh/karyawan mencapai 49,08 persen. Dan di Tidore Kepulauan pekerja keluarga/tak dibayar mencapai 32,00 persen.

Pekerja di Kota Ternate yang berstatus buruh/karyawan/pegawai mencapai 49,08 persen

b. Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Informasi sektoral atau lapangan usaha biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam berbagai literatur pembangunan ekonomi, tenaga kerja berpindah dari pertanian dan aktifitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa; dalam prosesnya pekerja berpindah dari desa ke kota.

Untuk kepentingan analisis, sektor dalam perekonomian dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yaitu A(griculture), M(anufacture dan S(ervices), berdasarkan pada definisi sektor *Internasional Standard Industrial Classification* (ISIC) System.

Sampai dengan saat ini, Maluku Utara masih merupakan provinsi dengan karakter agraris. Dilihat dari lapangan usahanya separuh lebih atau mencapai 54,31 persen penduduk Maluku Utara bekerja di sektor pertanian. Jika ditinjau menurut klasifikasi wilayah, terdapat perbedaan yang signifikan antara penyerapan lapangan pekerjaan antara di perkotaan dan perdesaan. Untuk wilayah perkotaan lapangan usaha yang menyerap banyak tenaga kerja adalah sektor S(ervices)/jasa-jasa, dimana 75,79 persen dari penduduk yang bekerja bekerja di sektor ini, sementara untuk wilayah perdesaan sektor A(griculture)/Pertanian tetap mendominasi dalam kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan mampu menampung 68,10 persen. Sedangkan untuk manufaktur masih relative sama antara desa dan kota.

Separuh lebih atau mencapai 54,31 persen penduduk Maluku Utara bekerja di sektor pertanian

Tabel 5 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Agustus 2013

Lapangan Usaha	Daerah		Jenis Kelamin		Total
	K	D	L	P	
Pertanian	13.88	68.10	55.34	52.30	54.31
Manufaktur	10.33	8.82	12.01	3.74	9.20
Jasa-Jasa	75.79	23.08	32.65	43.96	36.49
Total	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara Semester II Tahun 2013

Gambar 3 Persentase Pekerja berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi Maluku Utara, Agustus 2013



Hasil Sakernas Agustus 2013 menunjukkan bahwa di wilayah perkotaan terutama di wilayah administrasi Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan sektor pertanian mulai digeser oleh sektor jasa, sementara untuk Kabupaten/ Kota Lainnya sektor pertanian masih tampak mendominasi.

c. Pekerja Paruh Waktu

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja serta pada tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja perusahaan. Mengukur tingkat dan tren jam kerja di masyarakat untuk berbagai kelompok pekerja dan untuk pekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup, maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi. Indikator pekerja paruh waktu terfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari full time, sebagai proporsi dari total pekerja.

Tabel 6 Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin, Agustus 2013

Rincian	Daerah		Jenis Kelamin		Total
	K	D	L	P	
Penduduk yang Bekerja	113,243	332,116	294309	151050	445359
Pekerja Paruh Waktu	19,118	114,855	67023	66950	133973
Tingkat Pekerja Paruh Waktu (%)	16.88	34.58	22.77	44.32	30.08

Sumber : Badan Pusat Statistik Penduduk Provinsi Maluku Utara

Pada Agustus 2013 tingkat pekerja paruh waktu mencapai 30,08 persen yang dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 30 orang pekerja paruh waktu. Sementara share perempuan pada pekerja paruh waktu sebesar 49,97 persen yang berarti bahwa dari 100 pekerja paruh waktu, sekitar 50 orang adalah perempuan.

Tingkat pekerja paruh waktu perempuan lebih tinggi daripada tingkat pekerja paruh waktu laki-laki, masing-masing 44,32 persen dan 22,77 persen

Sementara itu, jika dilihat menurut daerah, perdesaan memiliki pekerja paruh waktu 17,70 persen lebih tinggi dibanding daerah perkotaan, masing-masing sebesar 34,58 persen dan 16,88 persen.

Share perempuan pada pekerja paruh waktu di kabupaten Halmahera Utara tertinggi bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yakni mencapai 70,37 persen.

*S h a r e
perempuan pada
pekerja paruh
waktu sebesar
49,97 persen
yang berarti
bahwa dari 100
pekerja paruh
waktu, sekitar
50 orang adalah
perempuan.*

d. Jam Kerja

KILM ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah orang yang dipekerjakan menurut jam bekerja (biasanya atau sebenarnya) : kurang dari 25 jam kerja per minggu, antara 25 dan 34 jam, antara 35 dan 39 jam, antara 40 dan 48 jam, antara 49 dan 59 jam, 40 jam keatas, 50 jam katas dan 60 jam keatas sebagaimana data yang tersedia.

Tabel 7 Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin, Agustus 2013

Sektor	Daerah		Jenis Kelamin		Total
	K	D	L	P	
Formal	65.86	44.65	56.92	36.65	50.05
Informal	34.14	55.35	43.08	63.35	49.95

Sumber : Badan Pusat Statistik Penduduk Provinsi Maluku Utara

e. Pekerja Sektor Informal

Sektor informal merupakan bagian penting dalam perekonomian di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja.

Penduduk yang bekerja di sektor informal didominasi oleh perempuan (65,35 %)

Situasi ketenagakerjaan di Maluku Utara pada Agustus 2013 didominasi oleh sektor formal dimana dari seluruh penduduk yang bekerja, 50,05 persen bekerja di sektor formal. Sementara di perkotaan, dari seluruh penduduk yang bekerja, sekitar 65,86 persen bekerja di sektor formal. Sebaliknya di pedesaan didominasi oleh sektor informal sebesar 55,35 persen.

Sementara berdasarkan jenis kelamin di sektor informal didominasi oleh perempuan yaitu mencapai 63,35 persen. Sebaliknya di sektor formal didominasi oleh laki-laki yaitu sebesar 56,92 persen.

INDIKATOR PENGANGGURAN

Adanya sejumlah pengangguran pada dasarnya menggambarkan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja (*excess supply*) pada pasar kerja dibanding lowongan yang tersedia. Pengangguran merupakan keadaan dari seseorang yang mengalami hambatan di dalam usahanya untuk memperoleh pekerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan yang secara aktif mencari kerja/mempersiapkan usaha. Tingginya angka TPT mencerminkan adanya kegagalan dalam pasar kerja untuk menyerap sejumlah angkatan kerja.

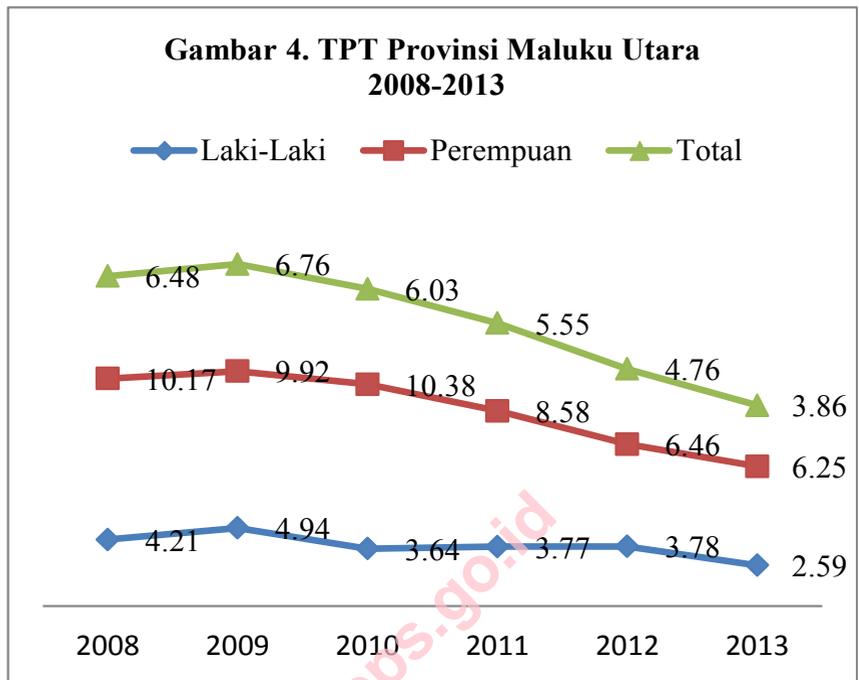
TPT atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran ini harus dilihat secara hati-hati dan tidak bisa digunakan serta merta sebagai pengukuran kesulitan ekonomi, tingkat kemiskinan “tidak selalu” berkorelasi dengan tingkat pengangguran. Sebagai contoh seseorang dengan kondisi latar belakang ekonomi dan pendidikan yang baik cenderung memilih pekerjaan (memilih menganggur daripada bekerja pada tingkat pendapatan atau status sosial yang lebih tinggi) meskipun kadang berarti melewatkan lowongan pekerjaan yang bisa didapatkan dengan mudah di depan mata. Sementara si miskin cenderung mengerjakan apa saja yang bisa dikerjakan karena tuntutan yang tinggi dalam upaya mempertahankan hidup.

Tingkat pengangguran dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif yang mencerminkan indikasi maupun kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan. Akan tetapi, tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan kesejahteraan ekonomi. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tapi tersedia dan secara aktif mencari pekerjaan. Angka ini menggambarkan tentang sumber daya ekonomi pekerja menganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja serta indikasi kegagalan mencari pekerjaan

Tingkat pengangguran secara matematis didefinisikan sebagai hasil bagi yang dihasilkan dari membagi jumlah pengangguran (untuk negara atau kelompok tertentu pekerja) oleh tenaga kerja yang sesuai, yang merupakan jumlah total orang yang bekerja dan tidak bekerja dalam kelompok. Harus ditekankan bahwa pengertian tersebut merupakan tenaga kerja atau bagian aktif secara ekonomi penduduk yang berfungsi sebagai dasar untuk statistik ini, bukan jumlah penduduk. Perbedaan ini tidak selalu dipahami oleh publik. Memang, istilah “angkatan kerja” dan “bekerja” kadang-kadang keliru digunakan secara bergantian.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan yang secara aktif mencari kerja/mempersiapkan usaha.

Tingkat pengangguran dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif yang mencerminkan indikasi maupun kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan.



TPT Maluku Utara adalah sebesar 3,86 persen, yang artinya dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia yang termasuk kategori penganggur ada sekitar 4 orang.

Tingkat pengangguran pada Agustus 2013 sebesar 3,86 persen

Pada lima tahun terakhir secara konsisten dan perlahan, TPT di Maluku Utara mengalami penurunan. Dari yang semula 6,76 pada Agustus 2009 turun menjadi 6,03 pada Agustus 2010 dan terakhir turun menjadi 3,86 pada Agustus 2013.

Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2013 TPT perempuan sebesar 6,25 persen, lebih tinggi dibandingkan TPT laki-laki yang sebesar 2,59 persen. TPT perempuan sebesar 6,25 persen berarti dari 100 orang perempuan yang termasuk dalam angkatan kerja, 6 diantaranya menganggur. Sedangkan untuk laki-laki dari 100 orang laki-laki yang termasuk dalam angkatan kerja, 3 diantaranya menganggur.

Tabel 8 TPT Menurut Pendidikan, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Maluku Utara 2013

Pendidikan yang Ditamatkan	Jenis Kelamin		Daerah Tempat Tinggal		Total
	Laki-Laki	Perempuan	Kota	Desa	
<= SD dan SMP	1.46	3.48	3.65	1.92	2.18
SMA Umum	3.42	13.96	6.61	6.50	6.14
SMA Kejuruan	5.16	9.78	7.47	6.07	6.38
Diploma I/II/III	0.53	3.95	2.22	3.09	2.77
Universitas	7.40	11.01	8.79	9.13	8.94

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

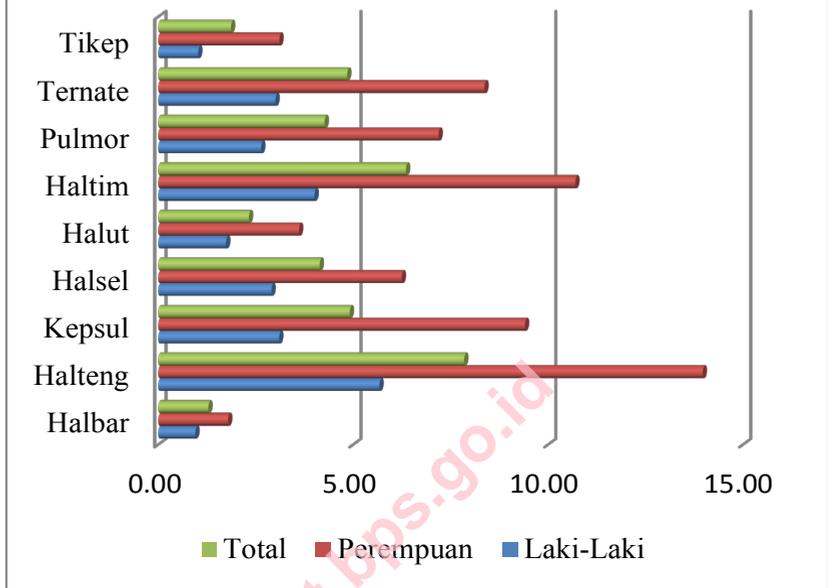
Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat pengangguran tertinggi adalah lulusan universitas yaitu mencapai 8,94 persen. Lalu menduduki urutan kedua adalah lulusan SMA Kejuruan dan SMA Umum yaitu 6,38 persen dan 6,14 persen. Hal ini bisa disebabkan kurangnya lapangan pekerjaan yang bisa menyerap sumber daya manusia dengan spesifikasi yang ada.

Pada Agustus 2013 ini, tingkat pengangguran perempuan lebih tinggi daripada laki-laki untuk semua jenjang pendidikan. Untuk jenjang pendidikan lulusan SMA Umum tingkat pengangguran perempuan mencapai 13,96 persen. Tertinggi kedua adalah lulusan universitas perempuan dengan tingkat pengangguran mencapai 11,01 persen.

Tingkat pengangguran tertinggi adalah lulusan universitas yaitu mencapai 8,94 persen

Sedangkan bila kita lihat berdasarkan daerah tempat tinggalnya tingkat pengangguran di desa maupun perkotaan bervariasi untuk tiap jenjang pendidikan. Namun jika kita bandingkan antara desa dan kota, TPT daerah perkotaan lebih tinggi daripada di daerah pedesaan, hal ini diduga karena tingkat selektifitas penduduk perkotaan lebih tinggi daripada penduduk pedesaan atau karena kurangnya ketersediaan lowongan di daerah perkotaan. Tingkat pengangguran lulusan universitas menduduki posisi tertinggi mencapai 9,13 persen di pedesaan dan 8,79 persen di perkotaan. (Tabel8)

Gambar 5. TPT menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku Utara, 2013



Dari Gambar 5 dapat dilihat bahwa kabupaten/ kota dengan TPT tertinggi adalah Halmahera Tengah (7,85 %) diikuti Halmahera Timur (6,35 %), dan Kepulauan Sula (4,91 %). Sementara itu tiga kabupaten/ kota dengan TPT terendah adalah Halmahera Barat (1,28 %), Tidore Kepulauan (1,87 %) dan Halmahera Utara (2,33 %).

Tingkat pengangguran tertinggi di Halmahera Tengah mencapai 7,85 persen

Sedangkan untuk perempuan dapat dilihat bahwa kabupaten/ kota dengan TPT perempuan tertinggi adalah Halmahera Tengah (13,97%) diikuti Halmahera Timur (10,70 %), dan Kepulauan Sula (9,40 %). Sementara itu tiga kabupaten/ kota dengan TPT perempuan terendah adalah Halmahera Barat (1,79 %), Tidore Kepulauan (3,11 %) dan Halmahera Utara (3,61 %).

<http://malut.bps.go.id>

TABEL-TABEL LAMPIRAN

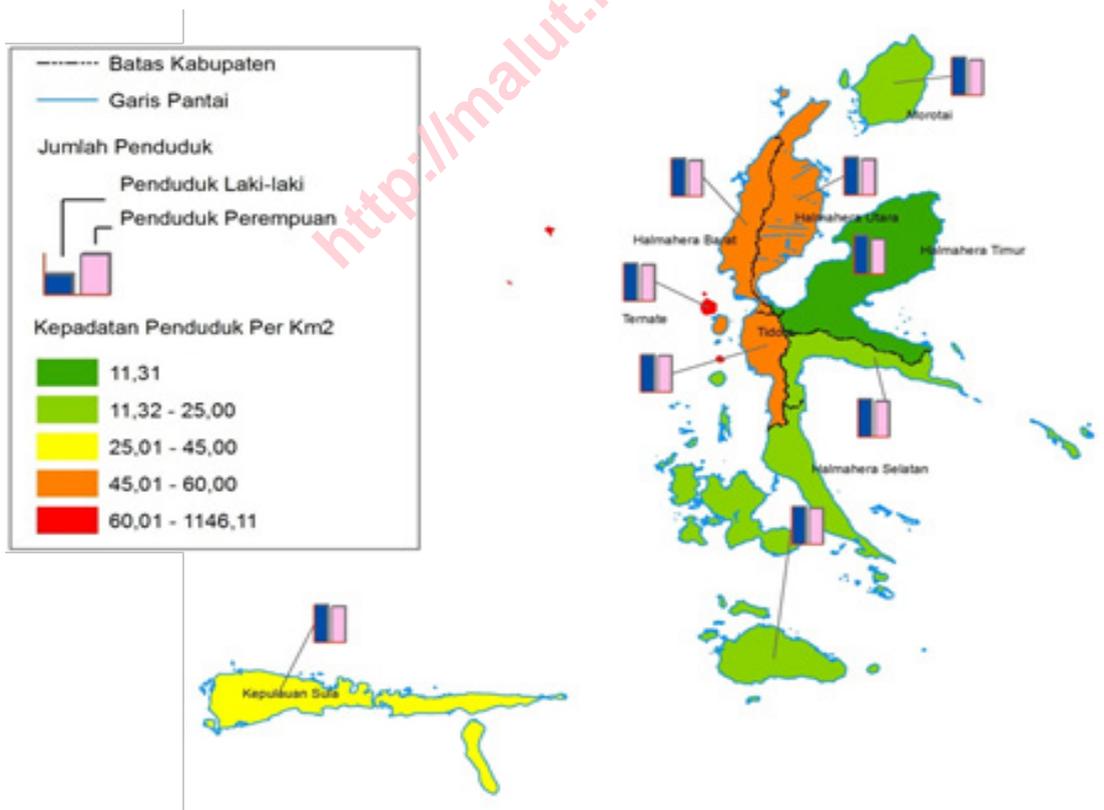
<http://malut.bps.go.id>

<http://malut.bps.go.id>

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Juni 2010	Juni 2011	Juni 2012	Juni 2013
Halmahera Barat	100.863	102.883	104.882	106.855
Halmahera Tengah	42.996	44.354	45.721	47.099
Kepulauan Sula	133.045	135.662	138.272	140.873
Halmahera Selatan	199.665	203.703	207.721	211.734
Halmahera Utara	162.620	166.112	169.611	173.105
Halmahera Timur	73.447	75.788	78.135	80.492
Pulau Morotai	52.918	54.447	55.985	57.534
Ternate	187.278	192.366	197.503	202.659
Tidore Kepulauan	90.504	91.897	93.245	94.546
Maluku Utara	1.043.336	1.067.212	1.091.075	1.114.897

Sumber : Proyeksi Penduduk Provinsi Maluku Utara



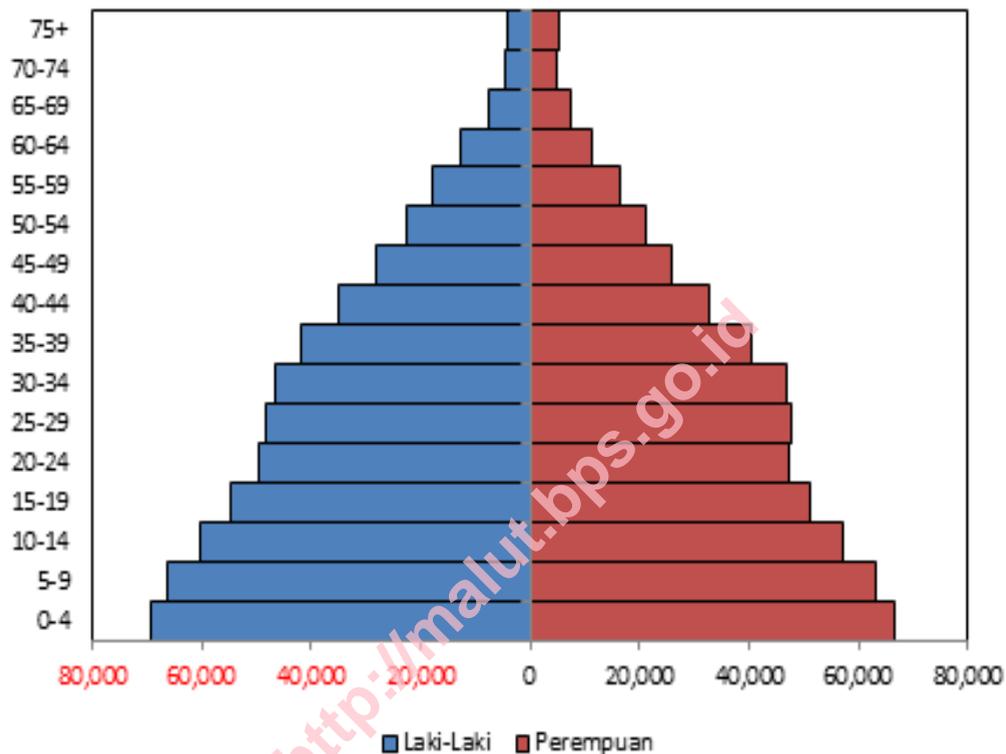
Tabel 2 Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2013

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	69.111	66.468	135.579
5-9	66.102	63.156	129.258
10-14	60.469	57.356	117.825
15-19	54.852	51.055	105.907
20-24	49.443	47.251	96.694
25-29	48.273	47.961	96.234
30-34	46.415	46.954	93.369
35-39	41.673	40.569	82.242
40-44	35.122	32.893	68.015
45-49	28.129	26.008	54.137
50-54	22.636	21.129	43.765
55-59	17.910	16.333	34.243
60-64	12.522	11.122	23.644
65-69	7.694	7.267	14.961
70-74	4.616	4.787	9.403
75+	4.297	5.324	9.621
JUMLAH	569.264	545.633	1.114.897

Sumber : Proyeksi Penduduk Provinsi Maluku Utara

Penduduk adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah dalam teritorial Negara Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan atau lebih, atau kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bermaksud menetap lebih dari 6 (enam) bulan.

Piramida Penduduk Provinsi Maluku Utara
Tahun 2013



Tabel 3 Penduduk Provinsi Maluku Utara Menurut Jenis Kegiatan Utama (ribu orang)

Jenis Kegiatan Utama	Februari 2012	Agustus 2012	Februari 2013	Agustus 2013
1. Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas)	694,8	702,5	710,3	719,5
2. Angkatan Kerja	471,2	466,1	482,3	463,2
Bekerja	446,2	443,9	455,7	445,4
Penganggur	25,0	22,2	26,6	17,8
3. Bukan Angkatan Kerja	223,6	236,4	227,9	256,3
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,82	66,35	67,90	64,38
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,31	4,76	5,51	3,86
6. Pekerja tidak penuh	174,2	193,7	198,9	187,8
Setengah Penganggur	94,8	77,2	66,3	53,8
Paruh Waktu	79,4	116,5	132,5	134,0

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Tabel 4 Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan (ribu Orang)

Status Pekerjaan	Februari 2012	Agustus 2012	Februari 2013	Agustus 2013
Berusaha sendiri	93,3	94,3	93,6	105,6
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	92,5	90,7	95,2	76,8
Berusaha dibantu buruh tetap	13,4	12,9	12,4	12,7
Buruh/karyawan	119,4	113,8	148,5	119,9
Pekerja bebas	18,9	23,0	19,9	23,4
Pekerja keluarga/tak dibayar	108,8	109,3	86,1	107,0
JUMLAH	446,2	443,9	455,7	445,4

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Tabel 5 Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan (ribu Orang)

Tingkat Pendidikan	Februari 2012	Agustus 2012	Februari 2013	Agustus 2013
SD ke bawah	213,4	199,5	200,5	189,1
Sekolah Menengah Pertama	83,3	91,0	76,3	86,8
Sekolah Menengah Atas	86,4	90,5	101,7	96,0
Sekolah Menengah Kejuruan	8,7	18,7	25,3	22,0
Diploma I/II/III	27,1	16,9	17,4	15,9
Universitas	27,4	27,3	34,4	35,5
JUMLAH	446,3	443,9	455,6	445,4

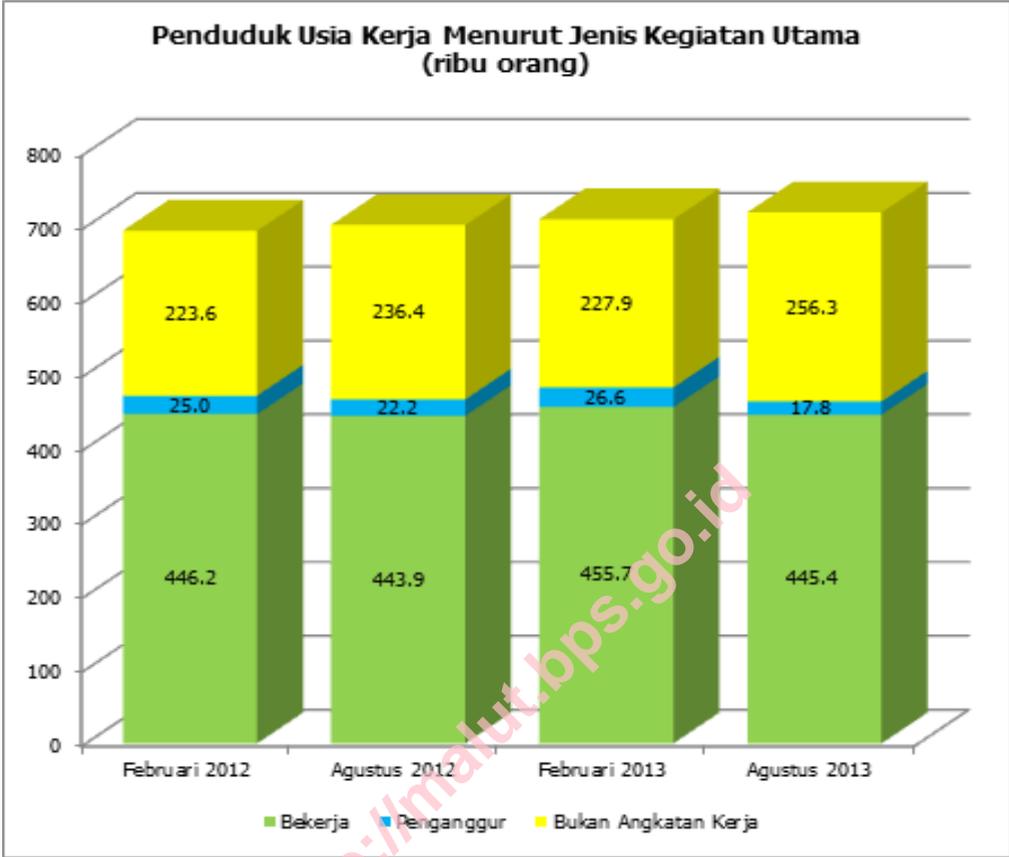
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Tabel 6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan (Persen)

Tingkat Pendidikan	Februari 2012	Agustus 2012	Februari 2013	Agustus 2013
SD ke bawah	1,5	3,06	1,6	1,09
Sekolah Menengah Pertama	3,1	3,68	4,7	4,49
Sekolah Menengah Atas	6,6	7,99	11,6	6,14
Sekolah Menengah Kejuruan	7,3	9,61	7,2	6,38
Diploma I/II/III	5,2	3,86	8,0	2,77
Universitas	11,4	6,36	7,5	8,94
JUMLAH	5,31	4,76	5,51	3,86

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

- Terkait ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi:
 - Penduduk Usia Kerja (PUK), yaitu penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.
 - Penduduk Bukan Usia Kerja, yaitu penduduk yang berusia 0-14 tahun.
- Penduduk Usia Kerja terdiri atas Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.
- Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.
- Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya.
- Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit selama 1 (satu) jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi.
- Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (*discouraged workers*), atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (*future starts*).
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase pengangguran terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja.
- Lapangan usaha/pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005 yang mengacu pada *the International Standard of Industrial Classification (ISIC)*.
- Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan.



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA**

Jl Stadion No 65 Ternate

Telp (0921)3127878 Fax : (0921)3126301

Homepage : <http://malut.bps.go.id>

Email : bps8200@bps.go.id